

Pilkada dan Paradigma Kekuasaan

A Kardiyat Wiharyanto

PELAKSANAAN pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak sudah semakin dekat. Sehingga perlu diprediksi potensi-potensi konflik yang sangat mungkin bisa mencuat ke permukaan. Memprediksi potensi konflik itu penting guna melakukannya antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di antara potensi konflik tersebut adalah munculnya fanatisme golongan pada pilkada mendatang.

Fanatisme golongan memang bisa tumbuh kapan saja dan di mana saja di negeri ini. Karena itu semua pihak perlu mewaspadaikan pada saat pilkada, karena menurut pengalaman pada pemilu-pemilu di negeri ini, disengaja atau tidak iklim pesta demokrasi sering dimanfaatkan kelompok tertentu yang rasa persatuan dan kesatuannya memang labil dan terbatas. Namun bisa jadi munculnya sikap fanatisme itu hanyalah terdorong keinginan untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dan sadar atau tidak membangkitkan emosionalisme golongan dengan mengeksploitasi perbedaan. Atau mengembus-embuskan bahwa kemajuan berbagai bidang yang dicapai suatu kelompok atau golongan merupakan ancaman bagi eksistensi kelompok atau golongan lainnya.

Sangat Beragam

Sekali pun fanatisme golongan biasanya sering menggejala pada sekitar pelaksanaan pemilihan, tetapi bukan berarti kita mengendurkan kewaspadaan pada hari-hari biasa. Pengalaman menunjukkan munculnya fanatisme golongan kadang-kadang sama sekali tidak terduga. Sebab yang disebut 'golongan' bisa sangat beragam. Mereka bisa berbentuk sekelompok masyarakat tertentu yang dilatarbelakangi persamaan agama dan keyakinan. Mereka bisa mewujudkan dalam kelompok masyarakat dengan latar belakang ekonomi tertentu yang lazim disebut kaya-miskin. Mereka juga bisa mewujudkan dalam kelompok masyarakat yang dilatarbe-

lakangi persamaan etnis dan budaya. Mereka juga bisa berbentuk kelompok masyarakat dengan latar belakang ideologi yang sama. Di sini lah pentingnya memprediksi potensi konflik pada pilkada mendatang, khususnya potensi konflik antarpengukung calon agar antisipasi keamanan bisa akurat.

Konflik antarpengukung calon juga bisa diprediksi sebelumnya. Misalnya berdasarkan analisa kondisi daerah. Analisa daerah itu harus dilakukan oleh daerah yang bersangkutan karena pemerintah daerah di wilayah itulah yang paling mengetahui keadaan daerahnya. Bagi daerah-daerah yang memang sudah ada konflik sebelum pilkada memang sudah bisa diketahui jauh sebelumnya sehingga bisa disiapkan terapi khusus. Daerah-daerah yang pernah atau sering terjadi konflik perlu ada skala prioritas.

Di samping itu, dalam setiap pilkada di negeri ini, satu persoalan pokok yang tak bisa ditawar oleh para calon kepala daerah mana pun adalah berkaca diri pada keadaan. Untuk membenahi keadaan moral yang rusak seperti sekarang ini dibutuhkan tokoh yang sungguh-sungguh berjiwa negarawan, sehingga bisa berlaku adil dan bijaksana dan berdiri di atas semua golongan.

Dukungan

Calon kepala daerah yang memiliki wawasan yang luas itu bisa saja karena dukungan dari organisasi keagamaan, organisasi adat, organisasi bisnis yang kuat, atau pun dari anggota partai politik. Calon tersebut memang memiliki pengalaman berorganisasi dan keuletannya teruji. Namun di

sisi lain, tidak sedikit calon tersebut setelah terpilih sebagai kepala daerah tetap berpikir sektarian, meski tidak transparan. Hal ini juga akan menjadi batu sandungan dalam mengendalikannya roda pemerintahan.

Tokoh-tokoh yang berhati serigala, berjiwa sektarian, dukungan dari para preman, para botoh dan kelompok mafia lainnya, lebih aman kalau tidak ikut mencalonkan diri. Walaupun tokoh-tokoh seperti itu memang ada yang bisa terpilih untuk menduduki kursi kepala daerah, tetapi rakyatlah yang akan menjadi korban.

Mudah-mudahan rakyat bisa memahami kelemahan-kelemahan pilkada di wilayahnya, sehingga tidak terjebak lagi pada praktik-praktik lama yang menyakitkan hati rakyat. Kesemuanya itu hanya bisa terjadi jika rakyat semakin memiliki kesadaran politik, serta mampu menggunakan hak pilihnya secara tepat. Hanya dengan itu rakyat akan mampu mengubah paradigma kekuasaan di negeri ini. □ - k

*) Drs A Kardiyat Wiharyanto MM,

Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.